

ANALISIS KINERJA DAN KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PROGRAM SMART CITY)**Herlina Khalik¹, Syamsu Alam², Muh Jamil³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar¹email : herlin.khalik@gmail.com²email : alam.s@unm.ac.id³email : muhjamil86@gmail.com**ABSTRACT**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan analisis berdasarkan perhitungan untuk menilai tingkat rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan pada konsep value for money yang telah dikembangkan dalam bidang keuangan yang bertujuan untuk mengetahui kinerja serta konsistensi pemerintah Kota Makassar dalam perencanaan pembangunan di bidang smart city. Subyek dalam penelitian ini adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Data penelitian diperoleh dengan metode kajian kepustakaan (liberary research). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah pada Program smart city dikategorikan ekonomis, efisien, dan tidak efektif. Sedangkan untuk konsistensi perencanaan Program smart city dalam hal konsistensi penyusunan anggaran dan target kinerja pada dokumen perencanaan termasuk kurang baik dikarenakan rata-rata pencapaian kinerja dan realisasi anggaran belum mencapai 100%.

This research is quantitative descriptive research which involves analysis based on calculations to assess the level of ratios used to evaluate performance based on the value for money concept which has been developed in the financial sector which aims to determine the performance and consistency of the Makassar City government in development planning in the smart city sector. The subject of this research is the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) document, while the sample in this research is the regional income and expenditure budget. Research data was obtained using the literature review method (liberary research). The research results show that the government's performance in the smart city program is categorized as economical, efficient and ineffective. Meanwhile, the consistency of smart city program planning in terms of consistency in budget preparation and performance targets in planning documents is considered poor because the average performance achievement and budget realization have not reached 100%.

Keywords: *Planning Consistency, smart city, Development Planning.*

I. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tanggung jawab pembangunan daerah dalam era otonomi yang luas, perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaannya sekarang telah didesentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam kerangka ini, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang krusial sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Konsep *smart city* mewakili suatu bentuk perencanaan kota yang terintegrasi dalam skala pembangunan yang holistik, dengan fokus utama pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang berkualitas, modern, dan maju. Ide ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi, sekaligus memberikan fondasi bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi negara cerdas.

Smart city adalah konsep perencanaan kota yang mengintegrasikan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi secara keseluruhan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan proses perubahan terstruktur dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep *smart city* yang berkembang membawa inovasi baru dalam mengatasi masalah yang ada di wilayahnya, yang kemudian menghasilkan peningkatan kualitas kota tersebut. Proses pembangunan daerah menuju *smart city*

dimulai dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang seringkali hanya digunakan untuk mengatasi permasalahan tertentu. Konsep *smart city* telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan kota, dianggap sebagai inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menerapkan konsep *smart city*, kota dapat menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk aktivitas mereka serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi di wilayah tersebut. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam konteks *smart city* adalah membantu mengelola seluruh infrastruktur, layanan, dan sumber daya kota melalui jaringan komunikasi dan informasi. Dengan menggunakan platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sehari-hari mereka.

Tujuan utama *smart city* adalah menciptakan kota yang aman, nyaman, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk mewujudkan konsep smart city, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart People*, dan *Smart Environment*. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di lingkungan perkotaan, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif, inklusif, serta efisien dan efektif. Pengembangan berbasis smart city telah menjadi model pembangunan yang lazim di seluruh dunia dan menjadi suatu kebutuhan yang harus disesuaikan oleh berbagai daerah, kota, dan kabupaten di Indonesia. Konsep *smart city* tidak hanya menekankan peningkatan efisiensi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga berfokus pada perkembangan masyarakat dengan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas TIK sebagai komponen pendukung atau perantara..

Namun, perlu dipahami bahwa konsep *smart city* adalah konsep yang baru dan dinamis. Inisiatif yang muncul sebagai solusi terhadap masalah kota satu tidak selalu dapat diterapkan sebagai solusi untuk masalah yang muncul di kota lain. Hal ini disebabkan karena *smart city* menekankan pentingnya inovasi dalam mengatasi berbagai masalah kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sensor, dan analisis data sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah. Namun sebuah perencanaan akan menjadi dokumen yang sia-sia apabila tidak dibarengi dengan penganggaran, hal ini dikarenakan penganggaran merupakan faktor utama dalam merealisasikan program, kebijakan, maupun kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kesenjangan antara dokumen perencanaan dan penganggaran mestilah diperhatikan, untuk menjamin konsistensi di dalamnya. Hal ini menjadi penting karena konsistensi perencanaan dan penganggaran adalah indikator penilaian kinerja pemerintah yang juga sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan dan terealisasinya Visi dan Misi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan dan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rancangan pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah. Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan :

- a) Teknokratik : yaitu perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan sistem dan kerangka pikir ilmiah agar mendapatkan tujuan dan juga sssaran pembangunan daerah
- b) Partisipatif : yaitu perencanaan pembangunan dilakukan dengan menyertakan pembagian pemangku kepentingan
- c) Politis : yaitu dilakukan dengan menguraikan visi, misi kepala daerah yang terseleksi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dibahas bersama DPRD
- d) Atas Bawah dan Bawah Atas : yaitu perencanaan pembangun ialah hasil perencanaan yang diacu dalam musyawarah pembangunan dilangsungkan mulai dari kelurahan, kecamatan, daerah, kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Namun sebuah perencanaan akan menjadi dokumen yang sia-sia apabila tidak dibarengi dengan penganggaran, hal ini dikarenakan penganggaran merupakan faktor utama dalam merealisasikan program, kebijakan, maupun kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kesenjangan antara dokumen perencanaan dan penganggaran mestilah diperhatikan, untuk menjamin konsistensi di

dalamnya. Hal ini menjadi penting karena konsistensi perencanaan dan penganggaran adalah indikator penilaian kinerja pemerintah yang juga sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan dan terealisasinya Visi dan Misi.

Konsistensi perencanaan dan penganggaran menjadi perihal yang perlu untuk dicermati sebab menjadi penanda dalam memperhitungkan kinerja pemerintah daerah supaya segala program serta aktivitas pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik.

Value for Money merupakan konsep penyelenggaraan organisasi sektor publik yang berfokus pada tiga elemen kunci, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam kegiatan, program, dan organisasi (Sari, 2014). Ketiga unsur utama *Value for Money* adalah sebagai berikut: ekonomis, menekankan pada hemat dan cermat dalam pengadaan serta alokasi anggaran; efisien, berfokus pada penggunaan anggaran secara berdaya guna untuk mencapai target kinerja dengan meminimalkan pengeluaran; dan efektif, menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran secara tepat guna (Purwiyanti, 2017)

II. METODE PENELITIAN

1. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kuantitatif, yang melibatkan analisis berdasarkan perhitungan untuk menilai tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja didasarkan pada konsep *Value for Money* yang telah dikembangkan dalam bidang keuangan.

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari data sekunder, seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) undang-undang, jurnal, dan buku yang relevan dengan fokus penelitian ini.

2. Ruang Lingkup

Populasi merujuk pada area generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diinvestigasi, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sampel merupakan sebagian dari total jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari dokumen RPJMD Kota Makassar dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data sampel tanpa memberikan kesimpulan umum terhadap seluruh populasi dari mana sampel diambil.

3. Tempat

Penelitian ini dijalankan di Kota Makassar, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik kajian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Makassar pada program *smart city*. Penelitian juga menggunakan kajian kepustakaan sebagai metode untuk merujuk teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki, sehingga membentuk dasar teoritis dalam penyusunan penelitian.

5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel mengacu pada pernyataan operasional konsep variabel, yang diimplementasikan secara praktis dan konkret dalam lingkup obyek penelitian yang sedang diselidiki. Definisi operasional memberikan penjelasan konkret mengenai arti setiap variabel penelitian.

- a) Perencanaan Pembangunan merupakan penyusunan program *smart city* dalam dokumen RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 secara sistematis, terkordinir, rasional dan konsisten. Tingkat konsistensi sebuah perencanaan pembangunan diukur dengan

- perbandingan antara dokumen awal RPJMD dengan dokumen evaluasi RPJMD yang dinyatakan dalam satuan persen(%).
- b) *Smart City* adalah suatu konsep pembangunan kota yang menggunakan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien, dengan mengintegrasikan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial di wilayah Kota Makassar.
 - c) Anggaran merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa program pada bidang smart city yang terdapat pada dokumen RPJMD pada periode 2021-2026 yang dinyatakan dalam satuan rupiah(Rp).
 - d) Kinerja merupakan gambaran pencapaian perencanaan pembangunan pemerintah Kota Makassar pada program *smart city* melalui beberapa program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Diukur dengan membandingkan anggaran yang dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan persen(%).
 - e) Konsistensi merupakan proses yang selaras dan tidak berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan pada program *smart city* diukur dengan membandingkan dokumen awal RPJMD dengan dokumen evaluasi RPJMD yang dinyatakan dalam satuan persen(%).
 - f) *Value for Money* adalah suatu konsep dalam mengevaluasi kinerja. Konsep ini merujuk pada indikator kinerja sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran yang dikeluarkan untuk program *smart city* menghasilkan nilai yang sesuai bagi masyarakat Kota Makassar.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data berupa statistik deskriptif dengan memanfaatkan alat analisis pengukuran kinerja *Value for Money* (Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas) dan melakukan perbandingan program untuk menilai konsistensi. Menurut Sugiyono(2018), statistik deskriptif merupakan metode yang umumnya dipakai untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam metode statistik deskriptif, peneliti hanya memberikan penjelasan terinci dan tidak membuat kesimpulan untuk populasi secara menyeluruh, melainkan berfokus pada sampel yang diambil.

Metode ini digunakan untuk merinci suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan data atau informasi yang telah terkumpul, yang kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi. Dalam proses analisis data ini, penelitian terbatas pada perhitungan persentase (%) dan menggunakan pemikiran logis untuk memberikan gambaran, penjelasan, serta uraian yang mendalam dan sistematis mengenai situasi yang sebenarnya. Selanjutnya, dari analisis tersebut diambil kesimpulan untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian. Adapun analisis data yang dimaksud, yaitu:

1) Pengukuran Kinerja *Value for Money* (Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas)

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

a) Ekonomi

Rumus untuk pengukuran ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Input : Dana realisasi yang digunakan
 Input Value : Dana anggaran yang dianggarkan
 Jika < 100% maka Ekonomis
 Jika = 100% maka Ekonomis Berimbang
 Jika > 100% maka Tidak Ekonomis

b) Efisiensi

Rumus untuk menghitung efisiensi adalah:

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Input : Dana realisasi yang digunakan
- Output : Hasil yang dicapai
- Jika <100% maka Efisien
- Jika =100% maka Efisien Berimbang
- Jika >100% maka Tidak Efisien

c) Efektivitas

Rumus untuk mengukur efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- Outcome : Tujuan/target yang hendak dicapai
- Output : Hasil yang dicapai
- Jika >100% maka Efektif
- Jika =100% maka Efektif Berimbang
- Jika <100% maka Tidak Efektif

2) Pengukuran Konsistensi

Secara umum, evaluasi tingkat konsistensi perencanaan dapat dilakukan dengan menilai kesinambungan muatan dari visi, misi, tujuan/sasaran hingga pada pembuatan program dan penganggaran, serta melihat persentase pencapaian kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau program yang telah ditetapkan. Setelah mendapatkan hasil pengukuran kinerja, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan analisis untuk menentukan keberhasilan, kegagalan, dan pencapaian dari suatu perencanaan. Terdapat dua metode untuk menilai pencapaian kinerja tersebut, yaitu:

- a) Peningkatan tingkat realisasi mencerminkan peningkatan pencapaian kinerja yang optimal. Rumus yang diterapkan adalah:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b) Semakin tinggi tingkat realisasi, semakin rendah prestasi kinerja yang tercapai, rumusnya adalah:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dalam penelitian ini, konsistensi suatu perencanaan diketahui dengan membandingkan kinerja program dan anggaran menurut jumlah, perbedaan dan persentase perubahan antar dokumen perencanaan. Rumus untuk melihat persentase target yang telah dicapai:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi Dokumen APBD}}{\text{Rencana Dokumen RPJMD}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- >100% maka sangat baik
- =100% maka baik
- <100% maka kurang baik

Rumus untuk melihat persentase target yang belum dicapai:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Selisih Dokumen Rpjmd}}{\text{Dokumen RPJMD}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- <100% maka sangat baik

=100% maka baik
>100% maka kurang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Gambaran Umum Program *Smart City* Dalam Dokumen RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah selama lima tahun. Di dalam RPJMD terdapat penjabaran mulai dari visi, misi, tujuan/sasaran, arah kebijakan, program/kegiatan hingga pada penganggaran untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dalam penelitian ini, dokumen yang akan digunakan antara lain adalah dokumen RPJMD dan APBD. Dalam bidang *smart city* terdapat program aplikasi informatika yang dimana mengutamakan percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur Sombere' dan Smart yang inklusif.

Konsep *Smart City* bersifat unik dan dinamis, di mana solusi yang berhasil diterapkan di satu kota tidak selalu cocok untuk kota lain, karena setiap kota memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, *Smart City* menekankan pentingnya inovasi yang didukung oleh teknologi informasi, sensor, dan analitik data untuk menyelesaikan masalah lokal. Pembangunan berbasis *Smart City* membuka ruang bagi berbagai pihak untuk berinovasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tantangan kota. Untuk itu, diperlukan panduan yang membantu Pemerintah Kota Makassar dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan *Smart City* sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya. Penyusunan masterplan *Smart City* Makassar bertujuan untuk menciptakan pedoman kerja yang sistematis dan realistis, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan publik yang terintegrasi dan inovatif

a) Program Aplikasi Informatika

Outcome dari program ini adalah terwujudnya pelayanan yang *Sombere' dan Smart*. Program ini tergolong ke dalam bidang *smart city* dan yang bertanggung jawab adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun target capaian kinerja dan anggaran program dari dokumen RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Target Kinerja dan anggaran Program *Smart City* Kota Makassar Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Target	Hasil
2022	21.626.122.000	23.165.173.100	100%	107,12%
2023	22.438.650.000	9.548.791.150	100%	42,56%
2024	23.683.220.000	15.571.717.150	100%	65,75%

Sumber: RPJMD Kota Makassar, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian kinerja pemerintah Kota Makassar dalam merealisasikan program *Smart City* untuk tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren positif dalam hal pencapaian target dan penggunaan anggaran. Meskipun realisasi anggaran pada tahun 2022 melebihi dari dana yang telah dianggarkan dan hasil capaian program mencapai 107%, menandakan tingkat ekonomis belum baik dalam implementasi. Pada tahun 2023, dengan penggunaan anggaran yang jauh lebih sedikit, realisasi anggaran meningkat menjadi 42,56%, dan hasil capaian juga meningkat. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan realisasi anggaran sebesar 65,75%. Secara keseluruhan, kinerja pemerintah dalam program *Smart City* Kota Makassar menunjukkan kemajuan yang konsisten, dengan peningkatan dalam realisasi anggaran, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi program pembangunan kota berbasis teknologi.

Kinerja pemerintah dalam program *Smart City* juga dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan dan regulasi yang ada mendukung inovasi teknologi dan integrasi sistem. Penerapan standar yang jelas, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan dukungan untuk riset dan pengembangan adalah faktor kunci dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan teknologi informasi.

2) Penilaian Kinerja Pemerintah Dalam Merealisasikan Program Pembangunan di Program Smart City

Dalam melakukan penilaian kinerja maka akan digunakan *value for money* sebagai pengukuran kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi input, output dan outcome juga haruslah diperhatikan. Konsep pengelolaan organisasi publik mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Adapun tolak ukur dari ketiga elemen tersebut yaitu :

a. Ekonomis

Rumus untuk pengukuran ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Input: Dana realisasi yang digunakan

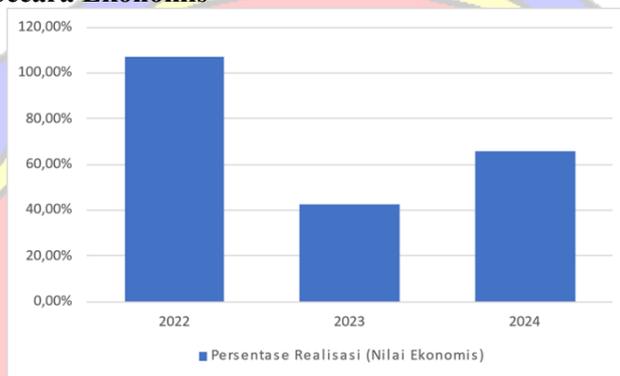
Input Value: Dana anggaran yang dianggarkan

Jika < 100 % maka Ekonomis

Jika = 100 % maka Ekonomis Berimbang

Jika > 100 % maka Tidak Ekonomis

Gambar 3. 1 Perbandingan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Program Smart City Secara Ekonomis



Sumber: Dokumen RPJMD, Hasil pengolahan 2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir nilai ekonomis dari perencanaan program *smart city* dengan pengembangan program aplikasi informatika berada pada persentase di bawah 100%, tetapi pada tahun 2022 berada pada persentase di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir realisasi program tersebut dilaksanakan secara ekonomis sesuai anggaran dan dana anggaran yang digunakan. Meskipun pada tahun 2022 menunjukkan persentase yang kurang baik dari dua tahun sebelumnya tidak menjadikan pelaksanaan program ini tidak bernilai ekonomis karena persentasenya masih dibawah 100%.

Ekonomis merupakan tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ekonomis juga berarti pemerintah mampu menggunakan anggaran dengan hemat serta mampu mengelola keuangan dengan baik. Tingkat ekonomis suatu anggaran dapat dinilai dari beberapa persentase tingkat capaiannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan membandingkan antara tingkat realisasi anggaran dengan anggaran dalam perencanaan dapat dikatakan bahwa program aplikasi informatika termasuk dalam kategori ekonomis. Karena bila dirata-ratakan dalam tiga tahun berjalannya RPJMD 2022-2024 nilai yang didapatkan adalah 72%. Artinya perencanaan program beserta anggarannya dapat dikatakan berhasil.

b. Efisiensi

Rumus untuk menghitung efisiensi adalah:

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

Keterangan:

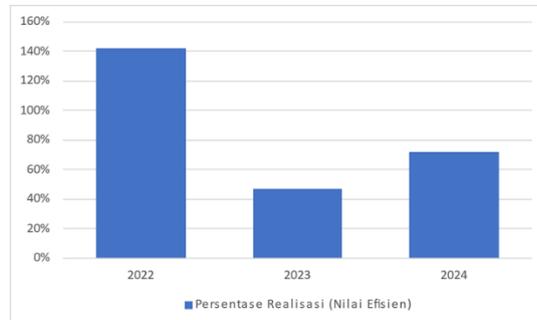
Input: Dana realisasi yang digunakan

Output: Hasil yang dicapai

Jika < 100 % maka Efisien

Jika = 100 % maka Efisien Berimbang

Jika > 100 % maka Tidak Efisien



Gambar 3. 2 Perbandingan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Program Smart City Secara Efisiensi

Sumber: Dokumen RPJMD, Hasil Pengolahan 2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir nilai efisiensi dari perencanaan program *smart city* dengan pengembangan program aplikasi informatika berada pada persentase di bawah dan di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir realisasi program tersebut dilaksanakan secara efisien sesuai anggaran dan dana anggaran yang digunakan. Meskipun pada tahun 2022 menunjukkan persentase yang melebihi 100%, tidak menjadikan pelaksanaan program ini tidak bernilai efisien, karena rata rata presentase efisiennya yaitu 87%.

Efisiensi diukur dengan menilai apakah suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan anggaran seminimal mungkin. Efisiensi suatu organisasi atau pemerintahan dapat dinilai apabila menghasilkan output yang sebesar-besarnya dengan input yang serendah-rendahnya.

c. Efektivitas

Rumus untuk mengukur efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

Keterangan:

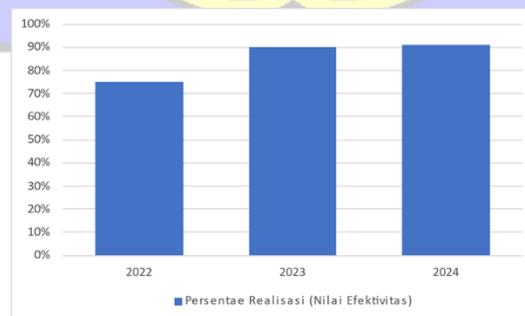
Outcome: Tujuan/target yang hendak dicapai

Output: Hasil yang dicapai

Jika > 100 % maka Efektif

Jika = 100 % maka Efektif Berimbang

Jika < 100 % maka Tidak Efektif



Gambar 3. 3 Perbandingan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Program Smart City Secara Efisiensi

Sumber: Dokumen RPJMD, Hasil Pengolahan 2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir nilai efektifitas dari perencanaan program *smart city* dengan pengembangan program aplikasi informatika berada pada persentase di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir realisasi program tersebut dilaksanakan secara tidak efektif sesuai anggaran dan dana anggaran yang digunakan. Hal itu terlihat dari persentase tiap tahun yang tidak satupun yang nilainya mencapai 100%.

Efektivitas dapat dikatakan sebagai ukuran keberhasilan bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, dalam melihat tingkat efektivitas suatu program dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya. Dan secara keseluruhan untuk program yang diteliti tidak masuk dalam kategori efektif.

Berikut adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas anggaran dan capaian kinerja pada program *smart city* yang termuat dalam RPJMD periode tahun 2021-2026.

Tabel 3. 2 Perbandingan Antara Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas

Program	Keterangan	2022	2023	2024	Rata-Rata
Program Aplikasi Informatika	Rasio Ekonomis	107%	43%	66%	72%
	Kriteria	Tidak Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
	Rasio Efisiensi	142%	47%	72%	87%
	Kriteria	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Efisien
	Rasio Efektivitas	75%	90%	91%	85%
	Kriteria	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Sumber : Dokumen RPJMD Hasil pengolahan, 2024

Dari tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa program aplikasi informatika terbilang ekonomis, efisien dan tidak efektif. Program aplikasi informatika terbilang ekonomis karena sepanjang tahun 2022 hingga 2024 bila dirata-ratakan rasio ekonomisnya tetap memenuhi kriteria ekonomis. Artinya program ini dalam hal pengeluaran anggaran tidak boros

3. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kota Makassar Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan elemen kunci dalam memastikan keberhasilan program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk di Kota Makassar. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, pentingnya konsistensi ini menjadi semakin nyata mengingat peran vital Diskominfo dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, Diskominfo harus memastikan bahwa setiap langkah perencanaan selaras dengan kebutuhan strategis serta anggaran yang dialokasikan dapat mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk melihat konsistensi suatu perencanaan yaitu dengan melihat konsistensi mulai dari visi, misi, tujuan/sasaran hingga pada pembuatan program dan anggaran menurut jumlah, perbedaan dan presentase perubahan antar dokumen. Konsistensi perencanaan pada dokumen RPJMD 2021-2026 mulai dari visi, misi, tujuan/sasaran hingga pada program dan penganggaran di bidang *smart city* pemerintah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere” dan “Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat Untuk Semua

Tabel 3. 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Anggaran

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran
------	--------	---------	---------	----------

Restorasi Ruang Kota yang Inklusif Menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang “Sombere” dan Smart City untuk Semua	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang “Sombere” dan Smart”	Program Aplikasi Informatika	93.189.069.000
---	---	--	------------------------------	----------------

Sumber : Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pemerintah Kota Makassar sudah konsisten dalam perencanaan di bidang *smart city* dilihat dari kesesuaian atau konsistensi visi, misi, tujuan, sasaran, program dan anggaran. Sedangkan untuk konsistensi dalam realisasi target kinerja dan anggaran dapat kita ukur dengan rumus berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Dokumen APBD}}{\text{Rencana Dokumen RPJMD}} \times 100\%$$

Keterangan:

>100% maka sangat baik

=100% maka baik

<100% maka kurang baik

Tabel 3. 4 Penilaian Konsistensi Program Smart City Kota Makassar Tahun 2022 – 2024

Tahun	Rencana RPJMD	Realisasi APBD	Selisih	Tercapai	Tak Tercapai
2022	Rp21.626.122.000	Rp23.165.173.100	Rp-1.539.051.100	107,12%	0%
2023	Rp22.438.650.000	Rp9.548.791.150	Rp12.889.858.850	42,56%	57,44%
2024	Rp23.683.220.000	Rp15.571.717.150	Rp8.111.502.850	65,75%	34,25%

Sumber: Dokumen RPJMD, Hasil pengolahan 2024

Berdasarkan tabel di atas mengenai penilaian konsistensi Program Smart City Kota Makassar pada tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi anggaran dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat selisih yang signifikan antara rencana dan realisasi RPJMD. Pada tahun 2022, realisasi melebihi dari 100% dari rencana dengan selisih sebesar Rp-1,5 miliar, sementara pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 42,56% dengan selisih Rp12,88 miliar. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 65,75%, dengan selisih yang berkurang menjadi Rp8,11 miliar. Meskipun ada peningkatan, persentase anggaran yang tidak tercapai masih cukup besar, menandakan tantangan dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan dalam realisasi anggaran menunjukkan adanya upaya untuk lebih mendekati target RPJMD dari tahun ke tahun. Namun, meskipun ada perbaikan, selisih yang masih signifikan antara rencana dan realisasi mengindikasikan bahwa program *Smart City* Kota Makassar belum sepenuhnya efektif dalam mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa perencanaan di masa mendatang lebih realistis dan implementasi program dapat berjalan lebih efisien, sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan lebih baik. Adapun perhitungan mengenai persentase pencapaian tahun 2022-2024 sebagai berikut:

a) Tahun 2022

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Dokumen APBD}}{\text{Rencana Dokumen RPJMD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rp23.165.13.100}}{\text{Rp21.626.122.000}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = 107,12\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase capaian untuk penilaian konsistensi program *smart city* Kota Makassar tahun 2022 sebesar 107,12%. Karena persentase capaian pada tahun 2022 > 100%, maka dapat disimpulkan capaian kinerja penilaian konsistensi program *smart city* Kota Makassar kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi program masih jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada perencanaan serta pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya.

b) Tahun 2023

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Dokumen APBD}}{\text{Rencana Dokumen RPJMD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rp9.548.791.150}}{\text{Rp22.438.650.000}} \times 100\%$$

Persentase Capaian= 42,56%

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase capaian untuk penilaian konsistensi program *smart city* Kota Makassar tahun 2023 sebesar 42,56%. Karena persentase capaian pada tahun 2023 < 100%, maka dapat disimpulkan capaian kinerja penilaian konsistensi program *smart city* Kota Makassar kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi program masih jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada perencanaan serta pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya.

c) Tahun 2024

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Dokumen APBD}}{\text{Rencana Dokumen RPJMD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rp15.571.717.150}}{\text{Rp23.683.220.000}} \times 100\%$$

Persentase Capaian= 65,75%

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase capaian untuk penilaian konsistensi program *smart city* Kota Makassar tahun 2024 sebesar 65,75%. Karena persentase capaian pada tahun 2024 < 100%, maka dapat disimpulkan capaian kinerja penilaian konsistensi program *smart city* Kota Makassar kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi program masih cukup jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada perencanaan serta pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan penilaian konsistensi program *Smart City* Kota Makassar pada tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa persentase capaian untuk setiap tahun masih di bawah 100%, yaitu 49,31% pada tahun 2023, dan 65,75% pada tahun 2024, dan di atas 100% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja program masih belum optimal dan realisasi anggaran masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam serta perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Berikut ini adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat konsistensi anggaran dan capaian kinerja dari program bidang urusan Smart City yang terdapat dalam dokumen RPJMD periode 2022-2024.

Tabel 3. 5 Tingkat Konsistensi Program Aplikasi Informatika dari Tahun ke Tahun

Program	Keterangan	2022	2023	2024	Rata-rata sudah tercapai	Rata-rata belum tercapai
Program Aplikasi Informatika	Anggaran	107%	43%	66%	72%	28%
	Kinerja	75%	90%	91%	85%	15%

Sumber : Dokumen RPJMD Hasil Pengolahan, 20

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa program Aplikasi Informatika dalam hal konsistensi masih kurang baik. Dapat dilihat dari tabel 4.5 di atas bahwa persentase capaian konsistensi program *Smart City* Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2024. Meskipun ada kemajuan, capaian ini masih kurang baik karena belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi program masih jauh dari target optimal, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan program untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas di masa mendatang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Value for money pada Program Smart City

Kinerja perencanaan pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana mengukur program dari segi pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran yang dibuat untuk bidang *smart city* dengan menggunakan konsep *value for money*. Adapun tujuan yang dikehendaki yaitu mencakup pertanggungjawaban yang mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian target kinerja. Terdapat tiga unsur utama *value for money* yaitu, ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan pengalokasian anggaran, efisien (berdaya guna) dalam hal penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja dalam artian meminimalkan penggunaan anggaran untuk hasil yang maksimal, serta efektif (tepat guna) dalam artian mencapai tujuan dan sasaran.

Dapat diketahui bahwa program aplikasi informatika terbilang ekonomis, efisien dan tidak efektif. Program aplikasi informatika terbilang ekonomis karena sepanjang tahun 2022 hingga 2024 bila dirata-ratakan rasio ekonomisnya tetap memenuhi kriteria ekonomis. Artinya program ini dalam hal pengeluaran anggaran tidak boros.

Anggaran yang dikeluarkan untuk menjalankan program jauh lebih kecil daripada yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Program aplikasi informatika juga terbilang efisien karena anggaran yang telah dikeluarkan untuk menjalankan program telah mencapai hasil target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, meski program ini terbilang ekonomis dan efisien, akan tetapi dalam hal efektivitas terbilang tidak efektifitas. Program ini tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan di awal. Artinya pencapaian kinerja selama tiga tahun program ini berjalan belum dapat mencapai target awal yang telah ditetapkan.

Dapat dikatakan bahwa semakin kecil rasio ekonomi yang diperoleh maka semakin baik kinerja suatu organisasi atau pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghematan yang dilakukan, pengeluaran jauh lebih kecil dari yang ditetapkan. Sehingga untuk kategori ekonomis, perencanaan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar periode 2022-2024 dalam program *smart city* selama tiga tahun berjalannya dapat dikatakan sudah melakukan penghematan dalam pengelolaan anggaran.

Diketahui dalam hal efisiensi, semakin kecil rasio yang dicapai, maka kinerja dikatakan semakin baik. Jadi untuk program aplikasi informatika periode 2022-2024 selama tiga tahun berjalan dari tahun 2022 sampai 2024 dapat dikatakan efisien karena mampu menggunakan anggaran yang seminim mungkin atau sehemat mungkin untuk meningkatkan pencapaian target kinerja. Efisien menuntut penggunaan anggaran yang minimum untuk mencapai hasil kinerja yang semaksimal mungkin.

Kinerja sebuah organisasi dikatakan semakin baik bilamana semakin besar rasio efektivitasnya. Sebaliknya, semakin rendah rasio efektivitasnya maka semakin buruk kinerja organisasi tersebut. Dalam penelitian ini, untuk program yang diteliti tidak termasuk dalam kategori efektif atau dapat dikatakan bahwa rasio efektivitasnya rendah. Ketidakefektivan ini terjadi karena tidak mampunya pemerintah Kota Makassar dalam mencapau target yang telah ditetapkan program di awal. Semestinta pemerintah mampu menyerap anggaran semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja program yang telah ditetapkan.

Terlepas dari hasil pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap program bidang *smart city* pada dokumen RPJMD periode 2021-2024 Kota Makassar yang hasilnya menunjukkan program tersebut terbilang ekonomis, efisien, dan tidak efektif. Namun, pemerintah Kota Makassar masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerja program tersebut dalam dua tahun sisa periode berjalan.

2. Konsistensi antar dokumen RPJMD periode 2021-2024

Pada peraturan pemerintah no 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional telah ditegaskan bahwa sinkronisasi penting dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan membandingkan antara dokumen awal RPJMD dan dokumen APBD didapatkan bahwa terdapat konsistensi dalam hal kesesuaian muatan yang terdapat dalam visi, misi, tujuan/sasaran hingga program yang terdapat pada bidang *Smart City*, akan tetapi terjadi ketidakkonsistenan antara target dan realisasi kinerja dengan penganggaran.

Setelah melakukan analisis data secara deskriptif didapatkan hasil bahwa anggaran dan target kinerja yang dihasilkan masih jauh dari yang ditentukan di awal. Dengan kata lain, pada dokumen perencanaan pembangunan pemerintah terdapat ketidakkonsistenan dalam menggunakan anggaran dan mencapai target kinerja untuk program *smart city*. Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan yang dilakukan belum baik karena tidak memenuhi kriteria berdasarkan teori yang digunakan. Menurut Caiden dan Wildavsky (1974) suatu perencanaan yang baik yaitu sistematis, efisien, terkoordinir, konsisten, dan rasional.

Dapat diketahui bahwa program Aplikasi Informatika dalam hal konsistensi masih kurang baik, persentase capaian konsistensi program *Smart City* Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2024. Meskipun ada kemajuan, capaian ini masih kurang baik karena belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi program masih jauh dari target optimal, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan program untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas di masa mendatang.

Semakin rendah persentase anggaran maka semakin baik apabila diikuti dengan persentase capaian kinerja yang semakin tinggi. Penggunaan anggaran yang rendah sangatlah bagus apabila diikuti dengan peningkatan capaian kinerja. Sebaliknya, jika anggaran yang dikurcikan tinggi tetapi realisasi capaian kinerja rendah, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi suatu organisasi atau pemerintahan. Maka dari itu, diharapkan agar penggunaan anggaran seminimal mungkin dari yang dianggarkan untuk kemudian mencapai target yang maksimal. Atau dengan kata lain menghindari penggunaan anggaran yang berlebihan dari yang telah ditetapkan.

Dibutuhkan sebuah komitmen dari pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan agar konsistensi perencanaan dan penganggaran semakin meningkat. Dokumen perencanaan perlu dijaga konsistensinya karena merupakan kunci keberhasilan pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pentingnya konsistensi tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal (2) ayat (4) huruf c : “menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan”.

Salah satu yang terpenting dari sebuah perencanaan yakni sumber daya manusia yang berkompeten

dalam menjalankan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan demi menjamin penyusunan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sumber daya yang dibutuhkan bukan hanya sekedar memiliki pendidikan yang tinggi, akan tetapi juga berkapabilitas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wasana & Halim, 2018) bahwa faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran pariwisata antara lain kurangnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran. Selain itu, juga dibutuhkan data yang akurat mengenai perencanaan program yang akan disusun.

Pemanfaatan data serta informasi yang akurat dapat menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Selama ini, penyusunan perencanaan selalu dilakukan dengan hanya berdasarkan pada perencanaan sebelumnya, padahal besar kemungkinan permasalahan yang akan datang sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Perencanaan yang disusun berdasarkan data yang tidak akurat berakibat adanya perubahan pada penyusunan anggaran dan bahkan pada pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pergeseran anggaran.

Faktor penting lainnya yang mesti diperhatikan adalah penerapan teknologi informasi untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan website pemerintah untuk melaporkan hasil kinerja cukup baik untuk memudahkan

akses masyarakat melihat dan menilai kinerja pemerintah, meski masih ada beberapa data yang masih belum terdapat pada website tersebut. Pemanfaatan website untuk transparansi laporan hasil kinerja sangatlah efektif. Sehingga masyarakat bilamana ingin melihat laporan hasil kinerja pemerintah tidak perlu datang langsung ke instansi terkait, akan tetapi cukup.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah dan hasil analisis data yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Untuk penilaian kinerja menggunakan konsep *value for money*, didapatkan hasil bahwa Program Aplikasi Informatika dikategorikan ekonomis karena dirata-ratakan rasio ekonomisnya tetap memenuhi kriteria ekonomis, efisien karena dapat dikatakan efisien karena mampu menggunakan anggaran yang seminim mungkin atau sehemat mungkin untuk meningkatkan pencapaian target kinerja, dan tidak efektif karena Ketidakefektifan ini terjadi karena tidak mempunya pemerintah Kota Makassar dalam mencapai target yang telah ditetapkan program di awal. Semestinta pemerintah mampu menyerap anggaran semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja program yang telah ditetapkan..
2. Untuk penilaian konsistensi dalam dokumen RPJMD tahun 2022-2024, didapatkan hasil bahwa Program Aplikasi Informatika dalam hal konsistensi penyusunan anggaran dan target kinerja pada dokumen perencanaan termasuk kurang baik dikarenakan rata-rata pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, <100%. Untuk konsistensi anggaran sebesar 49% dan rata rata kinerja 61%.Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. [Times New Roman, 11, normal].

V. REFERENSI

- Arwin, A. (2016). Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 4(6), 190–201.
- Aziz, I. J., Napitulu, L. M., Patunru, A. A., & Resosudarmo, B. P. (2010). Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim. In *Kepustakaan Populer Gramedia*.
- Fadila Nurjayanti, F. (2021). *PENGARUH KOMITMEN, ETOS KERJA DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Penelitian Pada Karyawan Non Manager PT Sinar Sosro KP. Tasikmalaya)*. 1–23. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/3098>
- Hasibuan, A., & Sulaiman, oris kianto. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127–135. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>
- Idris, K. (2018). Konsistensi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah kota depok. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 54–66.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial, CV Andi Offset*. Yogyakarta.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(1), 55–66.
- Osrinda, N., & Delis, A. (2016). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 151–162. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3517>
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigrasi Donggala Kodi. *Katalogis*, 5(3), 190–200.
- Puspawati, A. A. (2016). Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik PUBLISIA*, 1(1), 38–53. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/426>
- Sanuari, A., Hafizrianda, Y., & Rofingatun, S. (2016). Analisis-Konsistensi-Perencanaan-Dan-Penganggaran Dinas Kominfo Kab Pegunungan Bintang Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(2), 1–17.
- Sari, N. C. F. (2014). Prinsip Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi*

- AKUNESA, 3(2686–438), 1–25.
- Simatupang, S., Pengajar, S., Arsitektur, J., Kristen, U., & Sutoyo, M. (2015). Smart City : Kerangka Untuk Pengembangan. *Scale*, 3(1), 371–381. <http://repository.uki.ac.id/487/%0Ahttp://repository.uki.ac.id/487/1/6>. Sahala Simatupang.pdf
- Smart City 2021,. (2022). 2.
- Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 1–38. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4170>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Ketiga)*. Alfabeta.
- Utomo, C. E. W., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. *Jurnal Strategi dan Bisnis*, 4(2), 159–176.
- Wahyudi, T. (2018). Konsistensi Perencanaan Strategis Sektor Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 41–49. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.6>
- Wasana, S., & Halim, A. (2018). Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bidang Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 70–81. <https://doi.org/10.18196/jati.010208>

